

PETANI MELAWAN: SEJARAH PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN (GEGER CILEGON 1888)**Putri Rijkia Alpianti¹, Aldi Maulana², Lailatul Mafulah³, Eko Ribawati⁴****Author Email: 2288230004@untirta.ac.id**

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25 Serang Banten, 42117, Telp/ fax (0254) 280330

Abstrak

Pemberontakan petani merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan rakyat melawan penindasan dan ketidakadilan. Artikel ini mengkaji secara mendalam terkait pemberontakan petani di Banten yang dikenal sebagai Geger Cilegon 1888, sebagai studi kasus yang signifikan dalam memahami dinamika sosial-ekonomi dan gerakan perlawanan masyarakat pedesaan pada masa kolonial. Melalui analisis sumber-sumber sejarah dan pendekatan multidisiplin, artikel ini menelusuri akar-akar pemberontakan, mengungkap faktor faktor penyebab utama, seperti kebijakan pemerintah kolonial yang membebankan petani dengan pajak berat, serta praktik-praktik eksploitatif yang merampas hak-hak petani atas tanah dan hasil pertanian mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran tokoh-tokoh penting seperti Haji Wasid dan juga Haji Tubagus Ismail yang memimpin gerakan perlawanan dan mengorganisir aksi protes massal petani di wilayah Cilegon dan sekitarnya. Dengan didukung oleh data-data historis yang kuat, artikel ini mengungkapkan bagaimana pemberontakan petani Banten merupakan menifestasi dari akumulasi kekecewaan, ketidakpuasan, dan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjelaskan terkait perspektif yang mendalam dan mencerahkan tentang sejarah pemberontakan petani Banten, sekaligus memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia pada masa kolonial dan perjuangan para petani dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan.

Kata Kunci: Geger Cilegon, Kolonial, Pemberontakan, Petani.

Abstract

The peasant rebellion is one of the important events in Indonesian history which reflects the people's struggle against oppression and injustice. This article examines in depth the peasant rebellion in Banten known as Geger Cilegon 1888, as a significant case study in understanding the socio-economic dynamics and resistance movements of rural communities during the colonial period. Through analysis of historical sources and a multidisciplinary approach, this article traces the roots of the rebellion, revealing the main causal factors, such as colonial government policies that imposed heavy taxes on farmers, as well as exploitative practices that deprived farmers of their rights to land and produce. their farm. Apart from that, this article also highlights the role of important figures such as Haji Wasid and Haji Tubagus Ismail who led the resistance movement and organized mass farmer protests in the Cilegon area and surrounding areas. Supported by strong historical data, this article reveals how the Banten peasant rebellion was a manifestation of the people's accumulated disappointment, dissatisfaction and resistance to the colonial government. Thus, the results of this research provide an in-depth and enlightening perspective on the history of the Banten peasant rebellion, as well as providing an important contribution to understanding the socio-political dynamics of Indonesian society during the colonial period and the farmers' struggle for justice and freedom.

Keywords: Geger Cilegon, Rebellion, Peasants, Socio-Economic

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemberontakan dan perlawanan rakyat terhadap penjajahan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pemberontakan ialah sikap menolak atau menentang penguasa, dimana pemberontakan sendiri menyiratkan perlawanan terbuka terhadap pemerintah atau penguasa. Salah satu peristiwa penting yang mencatat perjuangan rakyat Indonesia adalah Pemberontakan Petani Banten atau yang dikenal dengan nama Geger Cilegon 1888. Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat petani di Banten terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dinilai sangat merugikan. Dimana terjadi penindasan dan eksploitasi petani yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terjadi pada akhir abad ke-19, saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang mengharuskan petani menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk menanam komoditas ekspor. Kebijakan ini, ditambah dengan pajak berat dan perampasan tanah, semakin memperparah kondisi ekonomi petani yang sudah termiskinkan. Tekanan inilah yang memicu ketidakpuasan dan menjadi faktor utama pemberontakan. Selain faktor ekonomi, pemberontakan turut dipengaruhi oleh faktor agama dan keyakinan mistis masyarakat Banten yang mayoritas Muslim. Dimana para elit agama adalah orang yang selalu menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Hadji Wasid dan Hadji Tubagus Ismail. Mereka mengorganisir gerakan perlawanan yang melibatkan ribuan petani dari berbagai daerah di Banten. Meskipun pada awalnya pemberontakan ini cukup mengancam kekuasaan kolonial Belanda, namun akhirnya dapat dipadamkan setelah tentara Belanda mengerahkan kekuatan militer yang besar. Peristiwa Geger Cilegon 1888 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Pemberontakan ini mencerminkan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi akibat dari kebijakan kolonial yang eksploitatif

Meskipun Pemberontakan Petani Banten telah menjadi subjek penelitian sebelumnya, masih terdapat celah (*gap*) yang perlu diisi. Kajian terdahulu mengenai Pemberontakan Petani Banten telah dilakukan oleh Ahmad Maftuh Sujana dan Saeful Iskandar dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Jihad dan Anti Kafir Dalam Geger Cilegon 1888. Didalam artikel ilmiah itu diulas terkait kondisi sosial masyarakat Cilegon pada tahun 1888, penggerak jihad protes petani Banten, hingga strategi pemberontakan yang dipimpin oleh para ulama. Dimana disini juga membahas terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Belanda yang mengubah sistem pemerintahan yang dibuat oleh Kesultanan Banten. Ditambah pihak pemerintah Belanda melaksanakan sistem perpajakan yang baru, tindakan sewenang-wenang yang memaksa rakyat harus bekerja lebih keras dalam beberapa pembaharuan yang membuat rakyat menderita.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghadirkan keterbaruan (*novelty*). Pertama, penelitian ini akan mengungkap latar belakang penyebab terjadinya Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888), mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan tersebut, serta menganalisis tujuan dan ideologi yang mendasari pemberontakan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam memimpin pemberontakan dan perannya, serta menggambarkan dinamika perlawanan petani melawan pemerintah kolonial Belanda selama pemberontakan berlangsung. Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Dengan memahami latar belakang, penyebab, tujuan, tokoh-tokoh utama, dan dinamika pemberontakan sehingga dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu, serta menghargai perjuangan dan pengorbanan para petani dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dan konsekuensi dari pemberontakan tersebut bagi masyarakat Banten dan kebijakan kolonial Belanda. Dengan demikian, kita

dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang signifikansi historis Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888) dan kontribusinya terhadap pergerakan nasional Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji topik dengan judul Petani Melawan: Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888). Rumusan masalah dari penulisan tersebut dijabarkan dalam pertanyaan berikut: (1) Bagaimana latar belakang penyebab terjadinya Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888)?; (2) Apa saja faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani banten (Geger Cilegon 1888)?; (3) Apa tujuan dan ideologi yang mendasari pemberontakan tersebut?; (4) Siapa tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam memimpin pemberontakan dan bagaimana perannya?; (5) Bagaimana dinamika perlawanan petani melawan pemerintah kolonial Belanda selama pemberontakan berlangsung?; (6) Apa dampak dan konsekuensi dari pemberontakan tersebut bagi masyarakat Banten dan kebijakan kolonial Belanda?

METODE PENELITIAN

Menurut Kuntowijoyo (2013: 69-82) metode sejarah terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi, dan (5) penulisan. Topik dalam penelitian "Petani Melawan: Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888)." Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Heuristik (Pengumpulan Sumber), pada tahap ini, dilakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah terkait Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888), baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber primer yang dikumpulkan meliputi laporan-laporan resmi pemerintah kolonial Belanda, arsip-arsip kolonial, surat-surat, laporan sezaman. Sumber-sumber sekunder yang digunakan meliputi buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Setelah sumber-sumber sejarah terkumpul, dilakukan kritik sumber untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber tersebut. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas isi sumber. Pada tahap ini, sumber-sumber sejarah yang telah lolos kritik diinterpretasikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses interpretasi melibatkan penggabungan fakta-fakta sejarah, mengidentifikasi pola-pola, dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Tahap akhir penelitian adalah historiografi, yaitu penulisan kembali peristiwa sejarah Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888) dalam bentuk karya ilmiah. Pada tahap ini, hasil interpretasi dan analisis disajikan dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, komprehensif, dan didukung oleh bukti-bukti sejarah yang kuat. Dalam penelitian ini, juga digunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan konsep-konsep dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan politik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik pada masa terjadinya Pemberontakan Petani

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Penyebab Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888).

Pemberontakan Petani Banten atau yang dikenal sebagai Geger Cilegon 1888 merupakan gerakan perlawanan petani di Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda. Seperti yang tercatat dalam buku *De Residentien Van Java* karya R Brons Middel (1895) disana tertulis "*Tjilegon, bekend om de onlusten van den 9en Juli 1888.*" Yang berarti Cilegon, terkenal dengan kerusuhan 9 Juli 1888. Latar belakang penyebab pemberontakan ini berakar pada kebijakan kolonial yang memberatkan dan menindas kehidupan petani di Banten pada abad ke-19. Salah satu latar belakang utama adalah kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang diterapkan Belanda sejak tahun 1830. Melalui kebijakan ini, petani dipaksa untuk menyediakan sebagian besar lahan dan tenaga kerja mereka untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Namun, imbalan yang diterima petani sangat

tidak layak dan tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan. Akibatnya, petani semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kekurangan pangan.

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan berbagai pajak dan pungutan yang memberatkan petani, seperti pajak tanah, pajak hasil bumi, dan pungutan kerja wajib (*herendiensten*). Beban pajak dan pungutan ini semakin memperparah kondisi ekonomi petani yang sudah sangat memprihatinkan. Praktik perampasan tanah milik petani oleh pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan swasta juga menjadi latar belakang pemberontakan ini. Lahan pertanian petani semakin menyempit, sementara mereka harus tetap menyediakan tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan milik pihak kolonial dan swasta. Kondisi ini menyebabkan petani semakin termiskinkan dan terjadi kesenjangan sosial yang besar antara petani dengan pihak kolonial dan pengusaha perkebunan. Kemiskinan dan penindasan yang dialami petani pada akhirnya memicu pemberontakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang sangat memberatkan kehidupan mereka.

Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888).

Menurut Sartono Kartodirjo (1984) dan Soekanto (1982) mengungkapkan bahwa reaksi pada suatu masyarakat untuk melakukan gerakan perlawanan sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: kondisi-kondisi sosial-ekonomi telah menimbulkan tekanan dan tuntutan-tuntunan yang asing dan tidak terduga sebelumnya. Pemberontakan Petani Banten atau Geger Cilegon 1888 merupakan puncak dari ketidakpuasan dan penindasan yang dialami masyarakat Banten, terutama para petani, di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa faktor penyebab pemberontakan tersebut ialah: (1) Faktor Geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, menghadap Selat Sunda yang menjadi pintu masuk utama pelayaran dari Samudera Hindia ke Laut Jawa. Pelabuhan Banten sejak abad ke-16 menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lain seperti lada, membuat wilayah ini diminati oleh kekuatan asing termasuk VOC lalu pemerintah Hindia Belanda. Kondisi geografis Banten yang sebagian besar adalah dataran rendah yang subur dan cocok untuk pertanian, membuat wilayah ini menjadi rebutan antara petani lokal dengan pemerintah kolonial untuk dijadikan lahan perkebunan. Dikarenakan wilayah ini memiliki potensial untuk perkebunan komersial seperti tebu, kopi, dan nila yang diinginkan pemerintah kolonial untuk diekspor, menciptakan konflik kepentingan dengan petani. Pengambil alihan lahan subur untuk perkebunan besar (*onderneming*) melalui kebijakan seperti *Agrarische Wet* 1870 meminggirkan petani kecil. Selain itu letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883 merusak banyak lahan pertanian di pesisir Banten akibat abu vulkanik dan tsunami. Bencana ini memperparah kemiskinan dan kerawanan pangan, sementara bantuan pemerintah kolonial dianggap kurang memadai, menambah kekecewaan rakyat. Situasi pasca-bencana dimanfaatkan tuan tanah dan pemodal besar untuk membeli lahan murah dari petani yang kesulitan, mengakselerasi perubahan tata guna lahan.

(2) Faktor Sosial, kesenjangan sosial yang besar antara petani pribumi Banten dengan pejabat dan tuan tanah Belanda yang tinggal di wilayah tersebut menjadikan petani pribumi mayoritas hanya memiliki lahan sempit atau menjadi buruh tani dengan upah rendah, sementara hasil pertanian dinikmati tuan tanah dan pedagang besar. Beban pajak seperti *landrente* (pajak tanah) dan berbagai pungutan lain seperti pajak pasar atau pajak jalan sangat memberatkan golongan bawah. Orang Eropa dan Timur Asing (terutama Cina) mendominasi sektor perdagangan dan industri bermodal besar, meninggalkan pribumi di lapisan bawah ekonomi. Dimana petani diperlakukan semena-mena, dieksploitasi tenaganya, dan hidup dalam kemiskinan, sementara pejabat kolonial dan tuan tanah hidup berkecukupan dengan menindas rakyat. Adanya diskriminasi sosial, budaya, dan agama terhadap masyarakat Banten oleh pemerintah kolonial Belanda yang mayoritas beragama Kristen juga kurangnya penghargaan terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat Banten

oleh pemerintah kolonial menyebabkan kekecewaan rakyat hingga terjadi pemberontakan. (3) Faktor Ekonomi, sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan sejak 1830 memaksa petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau di sebagian besar lahan mereka. Hal ini menyebabkan pengurangan produksi pangan dan pendapatan petani. Pengambil alihan tanah-tanah pertanian yang subur oleh pemerintah kolonial untuk dijadikan perkebunan milik swasta Belanda, sementara petani hanya memiliki lahan sempit yang kurang produktif dimana pajak tanah (*landrente*) yang tinggi, ditambah berbagai pungutan lain seperti pajak pasar, pajak usaha, hingga pajak kepala, sangat memberatkan rakyat. Eksploitasi tenaga kerja petani dengan upah yang tidak layak, sehingga petani hidup dalam kemiskinan. Rendahnya harga jual hasil pertanian petani, sementara mereka harus membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah kolonial membuat petani semakin miskin dan menderita sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang luar biasa.

(4) Faktor Politik, setelah kesultanan Banten runtuh kaum banngsawan mengalami banyak perubahan, diantaranya banyak yang melakukan jalan militan dan bersikap memberontak untuk mendirikan kembali kesultanan Banten. Kebijakan tanah dan perpajakan yang merugikan petani oleh pemerintah kolonial Belanda menimbulkan kesulitan ekonomi dan ketidakadilan bagi masyarakat. Kurangnya representasi dan suara dari masyarakat Banten dalam pemerintahan kolonial juga menjadi pemicu, dimana aspirasi mereka tidak didengar karena tidak ada sauran politik yang efektif untuk menyuarakan kepentingan pribumi. Perlawanan terhadap kekuasaan dan kebijakan kolonial Belanda yang dianggap menindas dan mengeksploitasi rakyat Banten, dimana praktik Kolonial Belanda memicu sentimen anti-kolonial dan keinginan untuk melawan kekuasaan asing yang dianggap merugikan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial yang korup dan tidak adil dalam memperlakukan masyarakat pribumi. Perlakuan yang berbeda cenderung merugikan pribumi dan semakin memperparah ketidakpuasan. Faktor politik tersebut menciptakan kondisi munculnya perlawanan. (5) Faktor Agama dan Budaya, masyarakat Banten yang mayoritas muslim merasa tersisihkan dan ingin mempertahankan identitas keagamaan serta budaya mereka dari pengaruh Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketidakpuasan rakyat terhadap upaya pemerintah kolonial untuk mengkristenkan masyarakat Banten dan menghilangkan identitas budaya lokal menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemberontakan. Dengan adanya kepemimpinan Kiai Wasid, seorang ulama Banten yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, mampu menggerakkan massa petani untuk memberontak melawan pemerintah kolonial Belanda. Haji Wasid adalah okoh utama Geger Cilegon, seorang ulama yang pernah berhaji dan belajar di Mekah. Ia membawa ajaran pembaruan Islam yang lebih puritan. Jaringan pesantren dan tarekat menjadi basis mobilisasi massa, dengan narasi "jihad melawan kafir" sebagai pemersatu.

Tujuan dan Ideologi yang Mendasari Pemberontakan

Pemberontakan di Banten pada tahun 1888 mencerminkan gerakan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya petani, tetapi juga ulama atau tokoh agama. Tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan dominasi sistem Barat yang telah memasuki wilayah tersebut dan mengembalikan sistem tradisional yang ada pada waktu itu. Pemberontakan ini juga dipicu oleh semangat keagamaan, termasuk ideologi Messiahistik. Alasan penolakan terhadap sistem Barat berkisar pada pandangan bahwa sistem tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi kalangan petani, yang harus membayar pajak lebih tinggi dan terlibat dalam kerja paksa. Masuknya pengaruh Belanda telah mengubah stratifikasi sosial di Banten, mengurangi pengaruh politik Sultan dan keluarga serta memberikan kekuatan tambahan kepada ulama atau pemuka agama yang memiliki prestise tinggi dalam masyarakat yang mayoritas Islam. Perubahan ini menyebabkan penindasan, yang menjadi pemicu bagi gerakan sosial melawan pemerintah kolonial di Banten.

Tujuan dan ideologi di balik Pemberontakan Petani Banten 1888 bersifat kompleks, mencerminkan persilangan berbagai arus pemikiran dan kepentingan. Pada level paling awal, pemberontakan ini merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang menekan. Tujuan paling mendasar adalah mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Banten. Para pemberontak melihat kehadiran Belanda bukan hanya sebagai penjajahan politik, tapi juga ancaman terhadap agama dan budaya mereka. Pemberontakan ini merupakan reaksi terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan rakyat, seperti pajak tinggi, tanam paksa, dan pengambilalihan tanah untuk perkebunan. Hal ini menyebabkan para petani ingin membebaskan diri dari beban ini dan mendapatkan kembali akses ke sumber daya ekonomi, terutama tanah. Pada masa Daendels (1808), pemilikan tanah Sultan dihapuskan. Dan, pada masa Raffles, tanah pusaka dipungut pajak dalam bentuk sewa tanah. Mereka yang memiliki tanah pusaka tersebut mendapat ganti rugi. Kebijakan seperti ini ternyata tidak memberikan kepuasan terhadap anggota kerabat dan pejabat-pejabat Sultan karena banyak dikorupsi oleh para pamong praja (Kartodirdjo, 1984:61). Sistem *cultuurstelsel* (tanam paksa) mungkin telah resmi dihapus, namun dampaknya masih terasa. Liberalisasi ekonomi yang mengikutinya justru sering kali memperburuk nasib petani kecil yang kalah bersaing dengan pemodal besar. Jadi, salah satu tujuan utama adalah meringankan beban ekonomi dan mengembalikan akses ke sumber daya produktif (terutama tanah) yang telah diambil alih sistem kolonial.

Selain itu ada keinginan untuk mengembalikan peran sentral ulama, kyai, dan bangsawan lokal dalam struktur sosial-politik, yang telah digeser oleh sistem administrasi kolonial. Terkait dengan ini adalah cita-cita untuk menghidupkan kembali kesultanan Banten atau setidaknya sistem pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam. Bagi banyak pemimpin pemberontakan, terutama yang berlatar belakang tarekat sufi, tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sepenuhnya diatur oleh hukum Islam. Penjajahan Belanda dilihat bukan hanya sebagai dominasi politik, tapi juga sumber kemerosotan moral dan spiritual yang harus dikoreksi. Pemberontakan dibingkai sebagai jihad - perjuangan suci untuk membebaskan wilayah Islam dari cengkeraman non-Muslim. Banyak pemimpin pemberontakan adalah anggota tarekat sufi, terutama Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Dalam pandangan mereka, perjuangan melawan Belanda bukan sekadar soal ekonomi-politik, tapi juga spiritual - membebaskan tanah Muslim dari cengkeraman "kafir". Konsep jihad menjadi kerangka ideologis penting. Namun, ini bukan hanya tentang konfrontasi kekerasan, melainkan juga perjuangan internal untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang dianggap telah menyimpang di bawah kolonialisme. Selain itu ada unsur *millenarianisme*, keyakinan bahwa saat pembebasan sudah dekat, ditandai munculnya pemimpin yang akan memulihkan tatanan Islami ideal. Beberapa tokoh pemberontakan diklaim sebagai Imam Mahdi atau Ratu Adil.

Meski Kesultanan Banten telah dihapus Belanda sejak 1813, memori akan kejayaan masa lalu tetap kuat. Beberapa pemimpin pemberontakan mengklaim garis keturunan dari sultan Banten. Hal ini mencerminkan keinginan untuk memulihkan sistem politik pra-kolonial di mana kekuasaan duniawi dan spiritual menyatu di tangan penguasa Muslim. Belanda dilihat bukan hanya sebagai penjajah, tapi juga penghancur tatanan kosmologis Banten. Tujuannya bukan hanya mengusir Belanda, tapi juga mengembalikan legitimasi elit tradisional (ulama dan bangsawan) yang perannya semakin tergerus kebijakan kolonial. Hingga akhir abad 19 adalah masa meningkatnya kontak antara Muslim Nusantara dengan gerakan pembaruan di Timur Tengah. Banyak ulama Banten telah menunaikan haji atau bahkan tinggal lama di Mekkah. Mereka membawa pulang gagasan pan-Islamisme: bahwa umat Islam sedunia harus bersatu melawan imperialisme Barat. Pemberontakan lokal dengan demikian dilihat sebagai bagian dari perjuangan lebih besar. Kekhalifahan Utsmaniyah, meski sedang melemah, masih dipandang sebagai simbol persatuan Islam dan pembebasan potensial dari Eropa. Beredar rumor bahwa bantuan Turki akan datang ke Banten.

Kolonialisme membawa perubahan drastis dalam struktur masyarakat Banten. Elit baru bentukan Belanda (*often from outsider backgrounds*) menggantikan peran pemimpin tradisional. Bagi banyak ulama dan kyai desa, ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga ancaman terhadap nilai-nilai dan praktik keagamaan yang telah mengakar. Modernisasi ala Barat dilihat sebagai sumber kemunduran moral. Pemberontakan dengan demikian juga bertujuan mempertahankan otoritas pemimpin agama lokal dan pola kehidupan komunal yang mereka pimpin. Meski belum menggunakan bahasa "nasionalisme" dalam pengertian modern, ada unsur kesadaran akan identitas bersama yang lebih luas dari sekedar Banten. Beberapa pemimpin pemberontakan pernah terlibat atau terinspirasi oleh gerakan anti-kolonial di daerah lain seperti Aceh atau Minangkabau. Mereka mulai melihat perjuangan mereka sebagai bagian dari fenomena yang lebih besar. Namun, "bangsa" yang dibayangkan masih lebih bersifat komunitas religius (umat) daripada entitas politik berbasis teritori seperti dalam nasionalisme abad 20. Dari petani miskin hingga haji terpelajar, dari kyai desa hingga aristokrat. Masing-masing membawa motivasi dan pemahaman sendiri, yang kemudian dirajut dalam narasi perlawanan bersama. Namun justru kompleksitas inilah yang membuat Geger Cilegon menjadi cermin menarik dari dinamika masyarakat pribumi di masa transisi, ketika kategori-kategori lama (Islam/kafir, pribumi/asing, tradisional/modern) mulai bergeser namun belum sepenuhnya tergantikan oleh kerangka berpikir baru.

Tokoh-Tokoh Kunci yang Terlibat Dalam Memimpin Pemberontakan dan Perannya.

Pemberontakan Petani Banten 1888 atau yang lebih dikenal sebagai Geger Cilegon 1888 adalah sebuah peristiwa pemberontakan tani terbesar yang terjadi pada tanggal 09 Juli 1888 setelah pembubaran Kesultanan Banten 1813 oleh VOC. Geger Cilegon dipelopori oleh seorang tokoh agama yaitu Haji Wasyid atau biasa disebut Ki Wasyid. Tidak Cuma Haji Wasyid saja, terdapat banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan petani Banten misalnya Kyai Haji Tubagus Ismail, Haji Abdul Karim, dan juga Haji Marjuki. Peran tokoh agama menjadi penting karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang dapat menyeruakan aspirasi rakyat, berikut ini tokoh dan perannya:

1. Kyai Haji Wasyid

Haji Wasyid adalah orang yang sangat berpengaruh bukan hanya karena statusnya sebagai guru agama tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat. Selain itu, ia dikenal sebagai orang yang suka bertengkar dan mudah marah serta memiliki kecenderungan mistis. Haji Wasyid adalah keturunan keluarga pemberontak. Ayahnya, Kyai Abas, ikut serta dalam Pemberontakan Wakhia pada tahun 1850 bersama Nasid Kepala Desa Citangkil. Ia melarikan diri ke Medang Batu, dimana dua orang sesepuh meminta bantuan Haji Wakhia. Ibu Haji Wasyid sendiri merupakan keponakan dari kepala desa Nasid. Pada bulan September 1887, Wedana Kramat memanggil Watu Haji Wasyid untuk memintanya menjelaskan alasannya tidak mengurus kebun istri ketiganya di Bojonegoro. Haji Mohammad Anwar, teman dekat dan orang kepercayaan Haji Wasyid, pertama kali diutus untuk menghadapi Wedana. Wedana berjanji tidak akan mengundang Haji Waysid untuk meninjau sampai taman yang disebutkan Wedana itu terawat dengan baik. Haji Wasyid memenuhi syarat tersebut, namun ia tidak bisa melupakan atau memaafkan perbuatan Wedana terhadapnya. Sebagai seorang kyai, Haji Wasyid memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Banten. Ia dihormati tidak hanya karena pengetahuan agamanya, tetapi juga karena kepemimpinannya yang kharismatik. Haji Wasyid menggunakan posisinya sebagai pemimpin agama untuk memobilisasi massa, terutama para petani dan pengikut tarekat, dalam melawan penindasan kolonial. Haji Wasyid menggabungkan ajaran Islam dengan semangat perlawanan terhadap penjajah. Ia menanamkan pemahaman bahwa melawan ketidakadilan dan penindasan adalah bagian dari jihad dengan memperkuat solidaritas di antara pengikutnya dengan mengajarkan bahwa perjuangan mereka memiliki dimensi spiritual, bukan hanya sekedar perlawanan politik atau ekonomi.

Haji Wasyid memanfaatkan jaringan pesantren dan tarekat untuk menyebarkan ide-ide perlawanan secara luas namun tersembunyi dari pengawasan pemerintah kolonial. Ia juga mengorganisir pertemuan-pertemuan rahasia di mana rencana pemberontakan dibahas dan dipersiapkan. Kemampuannya dalam mengorganisir membuat pemberontakan ini menjadi salah satu yang terbesar pada masanya di Pulau Jawa. Sosok Haji Wasyid sendiri menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Keberaniannya dalam memimpin pemberontakan menginspirasi banyak orang, beliau menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme bukan hanya tugas para bangsawan atau elit, tetapi juga kewajiban pemuka agama dan rakyat biasa. Pada puncak pemberontakan, Haji Wasyid memimpin langsung serangan terhadap pos-pos dan simbol kekuasaan Belanda di Cilegon. Kehadirannya di garis depan pemberontakan memberikan keberanian dan semangat juang yang besar kepada para pengikutnya. Setelah pemberontakan dapat diredam oleh Belanda, Haji Wasyid menjadi target utama penangkapan. Ia kemudian ditangkap dan diadili. Hukuman pengasingan yang ia terima yaitu dibuang ke luar Pulau Jawa hal ini menunjukkan betapa Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Meski diasingkan, pengaruh dan ajaran Haji Wasyid tetap hidup di kalangan masyarakat Banten, menginspirasi generasi berikutnya. Perjuangan Haji Wasyid juga memperkuat tradisi perlawanan berbasis agama di Nusantara. Ia menjadi contoh bagaimana seorang tokoh agama dapat menjadi ujung tombak perlawanan sosial-politik. Geger Cilegon yang ia pimpin membuat pemerintah kolonial lebih waspada terhadap potensi pemberontakan yang dipimpin oleh kyai dan ulama, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap Islam politik.

2. Haji Abdul Karim

Haji Abdul Karim tidak ikut serta dalam pemberontakan ketika kembali ke Mekkah menggantikan gurunya Ahmad Khatib Sambas sebagai ketua (khalifah) organisasi Qadiriyyah-Naqsyabandiyah. Namun ia menanamkan doktrin agama yang mendorong masyarakat Banten untuk memberontak. Haji Abdul Karim sendiri bukanlah seorang revolusioner radikal. Kegiatannya sebatas persyaratan menjalankan berbagai sila agama seperti shalat, puasa, zakat, dan dzikir. Setelah meninggalkan Banten, gerakan ini mulai menjauh dari kegiatan-kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk menentang kebangkitan agama. Haji Abdul Karim memperkenalkan empat doktrin agama: kedatangan Imam Mahdi, peringatan terakhir Nabi Muhammad untuk mendirikan negara Islam (Darul Islam), dan perang Sabil (Jihad fi Sabilillah). Semangat anti asing yang kuat mulai merasuki adat Tarekat. Terakhir, para Haji yang memberontak (Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki, dan Haji Wasid) sepenuhnya menundukkan ajaran mistik demi tujuan politik. Seorang ulama besar dan orang suci di mata umat, beliau mempelajari ajaran Ahmad Khatib Sambas sebagai ketua Tarekat Qadiriyyah (Thariqah). Karena keistimewannya, khotbah yang disampaikan oleh Haji Abdul Karim mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, sehingga beliau dihormati dan dianggap sebagai waliyullah (barokah) yang diberkahi dengan banyak keberkahan. Di kemudian hari ia dikenal dengan nama Kyai Agung. Murid-muridnya yang terkemuka antara lain Haji Sangadeli dari Kalorani, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, Haji Abubakar Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulaciri dan Haji Marjuki dari Tanara. (Isnaeni, 2018) Cita-cita Haji Abdul Karim atau Kyai Agung adalah mendirikan negara Islam. Popularitas Haji Abdul Karim menonjol di mata publik saat pernikahan putrinya dilangsungkan. Kyai-kyai yang berdatangan dalam jumlah besar tidak hanya dari Banten tetapi juga dari Batavia dan Priangan. Pernikahan itu dirayakan dengan megah. Haji Abdul Karim tidak perlu mengeluarkan uang karena para pengikutnya merasa sangat tersanjung jika semua kebutuhannya terpenuhi. Pada awal tahun 1876, Haji Abdul Karim diangkat menjadi ketua Tarekat Qadiriyyah (Thariqah) menggantikan Ahmad Khatib Sambas. Oleh karena itu, ia terpaksa meninggalkan Banten. Sebelum berangkat, ia mengunjungi wilayah Banten dan mengimbau masyarakat untuk menaati perintah dan menahan diri dari tindakan gegabah. Pada hari pemberangkatan, Senin, 13 Februari 1876,

Haji Abdul Karim meninggalkan tanah air bersama sepuluh orang anggota keluarganya, enam orang yang berperan sebagai pengawal selama perjalanan, dan tiga puluh orang yang menemani Kyai ke Batavia.

3. Kyai Haji Tubagus Ismail

Beberapa tahun berlalu sebelum ia muncul sebagai pemimpin baru. Pada tahun 1883, pemberontak kembali aktif dengan kedatangan Kyai Haji Tubagus Ismail, seorang anggota tarekat Qadiriyyah dan murid Haji. Abdul Karim. Dilihat dari namanya, ia termasuk bangsawan Banten yang sudah kehilangan pengaruh politiknya, namun tetap mempunyai gengsi sosial di kalangan masyarakat. Dia menunaikan ibadah haji beberapa kali dan perjalanannya ke Mekah meningkatkan permusuhannya terhadap penguasa kafir. Dan gagasan menghasut orang untuk pemberontak melawan mereka semakin matang. Kyai Haji Tubagus Ismail dianggap wali. Tanda dirinya akan menjadi wali terlihat ketika ia tidak mencukur rambutnya seperti yang biasa dilakukan jamaah haji. Di pesta-pesta, dia hampir tidak makan apa yang ditawarkan. Hal inilah yang mampu menarik perhatian publik. Setelah itu ia mulai menyebarkan gerakan pemberontak. Banyak Kyai kondang yang mendukung gagasan dan tugas sucinya, antara lain Haji Wasyid dari Beji, Haji Abu Bakar dari Pontang, Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Iskak dari Saneja, Haji Usmandar Tunggak, Haji Asnawi dari Bendung Lempuyang dan Haji Muhammad Asik Bendung.

Kyai Haji Tubagus Ismail berperan dalam mengonsolidasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, santri, dan bangsawan lokal yang tidak puas dengan pemerintah kolonial. Beliau juga terlibat dalam perencanaan strategi pemberontakan, termasuk penentuan waktu dan sasaran serangan. Tubagus Ismail menggunakan pengaruh religiusnya untuk memotivasi pengikutnya. Pemberontakan ini sering dikaitkan dengan semangat jihad melawan penindasan. Beliau memanfaatkan jaringan pesantren di Banten untuk menyebarkan ide-ide perlawanan dan memobilisasi dukungan. Pada 9 Juli 1888, para pemberontak menyerang pos-pos militer dan pemerintahan Belanda di Cilegon. Beliau bersama pasukannya berhasil menewaskan beberapa pejabat Belanda dan penduduk Eropa. Pemerintah kolonial Belanda merespons dengan keras. Mereka mengerahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan, yang akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Banyak pemimpin pemberontakan, termasuk Kyai Haji Tubagus Ismail, ditangkap. Beberapa dihukum mati, sementara yang lain, termasuk Tubagus Ismail, diasingkan ke luar Jawa.

4. Haji Marjuki

Dengan kedatangan Haji Marjuki pada bulan Februari 1887, maka pergerakan memasuki babak baru, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan rencana pemberontakan di kota Banten. Suatu ketika pada bulan Februari 1887, Haji Marjuki tiba di Batavia. Karena tidak mempunyai paspor, ia didenda dua puluh gulden. Ia juga menjual tasbih, Alquran, jimat dan barang-barang lainnya yang ia bawa dari Mekah. Ia kemudian mulai mengunjungi kabupaten Banten, Tangerang, Batavia, dan Bogor. Di sanalah ia mulai menyebarkan gagasan jihad. Beliau mengunjungi Haji Kasiman dari Tegalkunir dan Haji Camang dari Pakojan. Keduanya bersimpati dan menjanjikan dukungan kuat. Mereka rela mengirimkan muridnya ke Banten sebagai relawan. Haji Marjuki kembali ke Makkah pada bulan Agustus 1888. Ia segera kembali ke pekerjaan lamanya sebagai guru nahw (tata bahasa Arab), sharaf (sorof) atau sintaksis dan fiqh Arab. Ia mengecam keras pemberontakan yang dipimpin Haji Wasid. Menurutnya, pemberontakan Haji Wasid terlalu dini dan menimbulkan korban jiwa yang tidak perlu. Bagi Haji Marjuk, setiap pemberontakan harus dilakukan agar terjadi secara bersamaan. Selain itu, para pemberontak harus mempunyai cukup uang dan senjata. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa timbul perselisihan antara dua pemimpin, Haji Marjuk dan Haji Wasid, ketika diputuskan pemberontak pada Juli 1888. Haji Marjuki menceritakan kepada teman-temannya alasan kepergiannya. Ia menjelaskan, kondisi tangan kanannya tidak memungkinkan untuk ikut aktif dalam pertempuran. Jika ia tetap tinggal di Banten, ia akan

mendapat masalah, tentara Belanda akan membunuhnya, tidak berbuat apa-apa, dan mengancam Haji Wasid untuk membalas dendam. Satu-satunya pilihannya adalah kembali ke Mekah. Belum lagi istri dan anaknya meninggal di Makkah. Keadaan ini memaksa Haji Marjuk meninggalkan Banten.

Dinamika Perlawanan Petani Melawan Pemerintah Kolonial Belanda Selama Pemberontakan Berlangsung.

Dalam pemberontakan petani Banten 1888, terdapat beberapa dinamika perlawanan petani melawan pemerintah kolonial Belanda. Pasukan petani Banten yang dipimpin oleh para pemimpin seperti Haji Wasyid dan Haji Tubagus Ismail melancarkan serangan bersenjata terhadap pos-pos militer Belanda dan melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda yang beroperasi. Meskipun dengan persenjataan yang terbatas, petani menggunakan strategi gerilya dan memanfaatkan pengetahuan wilayah untuk menghadapi Belanda. Para petani melakukan aksi perang gerilya dengan menyerang secara tiba-tiba dan menghindari jika ada balasan kekuatan besar dari Belanda.

Pada 9 Juli 1888, pemberontakan pecah. Para petani Banten mengambil senjata dan memulai serangan terhadap pasukan Belanda. Bentrokan terjadi di berbagai wilayah, termasuk Cilegon dan sekitarnya. Petani menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan golok. Meskipun kurang terorganisir, semangat perlawanan mereka kuat. Mereka menyerang pos-pos Belanda, menghancurkan fasilitas, dan membebaskan tahanan politik. Pasukan Belanda, yang lebih terlatih dan dilengkapi senjata modern, merespons dengan keras. Terjadi pertempuran sengit di lapangan dan desa-desa. Pemberontakan berlangsung selama beberapa hari, tetapi akhirnya pasukan Belanda berhasil mengatasi perlawanan petani. Banyak pemberontak tertangkap dan diasingkan. Sekitar 100 pemberontak menyerang rumah Henri Francois Dumas, juru tulis di kantor asisten residen. Pemberontak membagi diri menjadi tiga pasukan dengan tujuan menyerang penjara, kepatihan, dan rumah asisten residen di alun-alun Cilegon. Dumas menjadi korban pertama, dan serangan berlanjut ke rumah-rumah pejabat Belanda lainnya. Haji Tubagus Ismail dan pasukannya menemukan Dumas yang bersembunyi di rumah seorang Tionghoa. Pasukan lain menyerang rumah asisten residen Johan Hendrik Hubert Gubbels dan membunuh dua anaknya. Sementara pemberontak lain menyerang Ulric Bachet, kepala penjualan garam, yang juga tewas. Sebagian pemberontak berhasil membebaskan sekitar 20 tahanan dari penjara. Minah, pembantu Dumas, yang berani melindungi anak majikannya, dianugerahi bintang perunggu sebagai tanda jasa dan setia.

Dampak dan Konsekuensi dari Pemberontakan Bagi Masyarakat Banten dan Kebijakan Kolonial Belanda.

Kedatangan Belanda sebagai penjajah membawa perubahan signifikan pada struktur sosial masyarakat Banten, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin, implementasi sistem kerja paksa, dan eksploitasi sumber daya alam. Perubahan ini menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan petani Banten yang dipicu oleh kondisi kelaparan dan wabah penyakit yang menyerang hewan ternak menyebabkan Belanda menerapkan kebijakan pemusnahan hewan secara massal, termasuk yang tidak berpotensi terkena wabah, dan membebaskan pajak yang tinggi pada masyarakat. Kebijakan ini membuat para petani merasa tertekan dan marah. Hingga pada tanggal 9 Juli 1888, sekelompok pemberontak berjumlah sekitar 100 orang bergerak dari tempat Haji Ishak di Saneja untuk menyerang rumah Francois Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen VOC. Meski Dumas berhasil melarikan diri, pemberontakan tetap berlanjut dengan pembebasan tahanan politik dan penyerangan rumah asisten residen di Kota Cilegon. Puncak dari pemberontakan ini adalah ketika Belanda meruntuhkan menara masjid, yang merupakan simbol perlawanan dan identitas bagi masyarakat Banten.

Peristiwa ini membawa dampak bagi masyarakat Banten dan kebijakan kolonial Belanda. Dampak yang terjadi bagi masyarakat dari pemberontakan ini ialah menimbulkan korban jiwa, baik di pihak petani Banten maupun pihak Belanda. Sejumlah desa di Banten juga mengalami kerusakan properti akibat pertempuran yang terjadi. Petani Banten yang terlibat dalam pemberontakan mengalami kerugian ekonomi yang besar. Hasil panen mereka dijarah atau dimusnahkan oleh pasukan Belanda sebagai hukuman. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan represif terhadap masyarakat Banten. Mereka mengalami intimidasi dan pengawasan ketat untuk mencegah pemberontakan serupa di masa depan. Sedangkan dampak bagi kebijakan kolonial pemberontakan ini mendorong Belanda untuk mengubah kebijakan agraria mereka di Banten. Mereka mulai memberlakukan sistem sewa tanah yang lebih ketat dan mengurangi kewajiban petani untuk menyerahkan hasil panen kepada pemerintah kolonial. Untuk mengantisipasi pemberontakan serupa di masa depan, Belanda memperkuat pasukan militer mereka di wilayah Banten dan daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Pemberontakan ini membuat Belanda menyadari pentingnya melibatkan pemimpin lokal dalam pemerintahan kolonial. Mereka mulai mengadopsi strategi "asosiasi" atau kerja sama dengan elit lokal untuk menjaga stabilitas wilayah jajahan. Selain itu ada beberapa dampak dari peristiwa pemberontakan petani Banten 1888, yaitu sebagai berikut:

(1) Dampak Politik, pemerintah menempatkan pasukan-pasukan kecil di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat pemberontakan. Pemecatan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap bersalah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang dibidang administratif. Pencabutan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan mengenai pemungutan berbagai macam pajak dan adanya peraturan baru mengenai kerja wajib, sewa tanah, pajak, dan perdagangan. Pemerintah mengambil tindakan-tindakan jangka panjang untuk mencegah pemberontakan. Menunjukkan adanya pertumbuhan nasionalisme, meskipun kesadaran politik dari pemimpinnya seperti mengembalikan tanah kepada rakyat karena pada dasarnya orang-orang asing tidak mempunyai hak untuk memilikinya. (2) Dampak Sosial-Ekonomi, setelah pemberontakan rakyat Banten menjadi semakin menderita karena adanya kerja paksa untuk pembuatan jalan Anyer-Panarukan. Selain itu munculnya kaum elit baru yaitu pamongpraja. Lahan pertanian sudah tidak subur lagi dan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para elit tentang lahan negara (diperjualbelikan). (3) Dampak Religi, membuat peraturan baru tentang ketentuan pembatasan jamaah haji bagi masyarakat Banten khususnya larangan untuk mengadakan arak-arakan dan hiburan musik dalam pesta-pesta dan penyelenggaraan dzikir tidak boleh mengganggu lingkungan. Pembatasan-pembatasan terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak baik dan merendahkan yang dikaitkan dengan pendidikan agama. Mendirikan sekolah-sekolah model Barat sebagai upaya penekanan untuk mengurangi perlawanan rakyat Banten.

KESIMPULAN

Pemberontakan Petani Banten 1888, yang juga dikenal sebagai Geger Cilegon, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan anti-kolonial di Nusantara. Peristiwa ini mencerminkan hubungan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan yang membentuk dinamika masyarakat pribumi di bawah kekuasaan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Latar belakang pemberontakan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural yang tercipta akibat kebijakan kolonial. Penerapan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) sejak 1830, meski secara resmi telah berakhir, meninggalkan warisan eksploitasi ekonomi yang berlanjut ke era liberalisasi. Petani Banten menghadapi beban ganda: di satu sisi mereka dibebani pajak tinggi dan kerja paksa (*rodi*) oleh pemerintah, di sisi lain tanah-tanah produktif semakin banyak jatuh ke tangan perusahaan perkebunan swasta. Kondisi ini diperparah oleh perubahan drastis dalam

struktur sosial-politik lokal, di mana peran elit tradisional (ulama dan bangsawan) yang selama ini menjadi sandaran masyarakat, semakin tergerus oleh sistem administrasi kolonial yang mengandalkan birokrat pribumi bentukan Belanda. Namun, faktor-faktor material ini berinteraksi dengan diberi makna oleh dinamika keagamaan yang khas. Banten abad ke-19 menyaksikan menguatnya pengaruh tarekat yang memainkan peran sentral dalam memobilisasi massa. Para kyai dan haji, yang sering juga pemimpin tarekat, mengartikulasikan kekecewaan ekonomi-politik dalam bingkai perjuangan spiritual: melawan Belanda bukan hanya untuk memperbaiki nasib duniawi, tapi juga membebaskan tanah Muslim dari cengkeraman "kafir" yang dilihat sebagai sumber kemerosotan moral-religius. Penting pula dicatat bahwa periode ini adalah masa meningkatnya kontak antara Muslim Nusantara dengan gerakan-gerakan pembaruan di Timur Tengah, yang membawa gagasan Pan-Islamisme dan solidaritas global dalam menghadapi imperialisme Barat.

Perpaduan berbagai arus pemikiran ini melahirkan tujuan-tujuan pemberontakan yang multi-dimensi: menggulingkan pemerintah kolonial Belanda, menghapuskan eksploitasi ekonomi, memulihkan otoritas tradisional dan keagamaan, menegakkan syariah dan tatanan Islami, serta menciptakan keadilan sosial yang sering dibayangkan dalam kerangka millenarian (keyakinan akan datangnya zaman keemasan). Bagi banyak pemberontak, cita-cita tertingginya adalah menghidupkan kembali kesultanan Banten atau setidaknya sistem politik yang menyatukan kekuasaan duniawi dan spiritual di bawah pimpinan legitim. Yang menarik, meski belum menggunakan bahasa "nasionalisme" modern, gerakan ini juga menunjukkan kesadaran akan identitas bersama yang lebih luas dari gagasan "bangsa", meski masih lebih dipahami sebagai komunitas religius daripada entitas politik berbasis wilayah. Tujuan-tujuan ini digerakan oleh tokoh-tokoh kunci seperti Tubagus Ismail, dan juga Kyai Haji Wasyid, kyai desa yang menjadi ujung tombak mobilisasi petani. Sosok-sosok ini mewakili persilangan antara otoritas tradisional, kealiman religius, dan dalam beberapa kasus, klaim aristokrasi perpaduan yang memberi mereka legitimasi kuat di mata rakyat. Ketika pecah pada Juli 1888, pemberontakan ini menunjukkan skala yang mengejutkan pihak Belanda. Massa petani bersenjata tajam menyerang pos-pos pemerintah, membunuh beberapa pejabat Eropa dan pribumi yang dianggap kolaborator. Namun, seperti banyak gerakan anti-kolonial sporadis lain di abad ke-19, Geger Cilegon akhirnya dapat ditumpas oleh kekuatan militer kolonial yang lebih terorganisir. Represi yang menyusul berlangsung brutal: ratusan orang diadili dengan hukuman mulai dari kerja paksa hingga eksekusi, sementara tokoh-tokoh utama seperti Ismail dan Wasyid dihukum pengasingan ke luar pulau. Meski gagal menggulingkan kekuasaan Belanda, pemberontakan ini membawa dampak jangka panjang yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhudri, A. T., Dharmawan, A. H., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. P. (2018). *Metamorfosis Gerakan Sosial di Banten: Dari Romantisme Identitas ke Isu Agraria Lingkungan*. Jurnal Sodality, 6(1), 24-31.
- Ansor, A. S., & Muttahidah, M. (2020). *Kepemimpinan Kiai Wasyid dalam Memimpin Pemberontakan Geger Cilegon 1888*. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(02), 47-73.
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharma, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). *Sejarah Pemberontakan dalam Tiga Bab: Modernitas, belasting, dan Kolonialisme dalam Sitti Nurbaya*. SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya, 3(1), 1-22.
- Eko Ribawati, Agus Rustamana. 2023. *Sejarah Sosial Ekonomi (Kajian Masyarakat Jawa dan Banten)*. Tangerang : Media Edukasi Indonesia
- Fauzan, R., Yawati, J., & Ribawati, E. (2019). *Pengembangan Media Flash Flipbook Digital Dalam Pembelajaran Sejarah Sma Materi Sejarah Lokal Geger Cilegon 1888 Di Sma Negeri 1 Ciruas*. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah, 2(2).

- Fauzia, A. (2020). *Peranan Haji Tubagus Ismail sebagai Penggerak Perlawanan Rakyat Banten Terhadap Kolonial Belanda 1888* (Bachelor's thesis, Fakultas Adab dan Humaniora).
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Mr. S. C. H. Nederburgh. (1888). *Tjilegon. Bantam. Java. Iets Over Des Javaans Lasten En Over Zijne Draagkracht*. Sgravenhage, Martinus Nijhoff 1888
- R. Brons Middle. (1895). *De Residentiën Van Java*. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar
- Romualdi B.K (2023). *Telaah Perubahan Stratifikasi Sosial Masyarakat Banten Sebelum Pemberontakan Tahun 1888*. Yogyakarta, Indonesia.
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). *Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja"*. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Sujana, A. M., & Iskandar, S. (2019). *Jihad dan Anti Kafir dalam Geger Cilegon 1888*. *Tsaqofah*, 17(1), 1-15.
- W. Van. Gelder. (1889). *Beschrijving Van Het Eiland Java En Zijn Bewoners*. Batavia. G. Kolff & Co